

Agung Wihandoko

Persepsi Dan Tingkat Partisipasi Masyarakat Pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) Di Kabupaten Mesuji (Studi Kasus Kecamatan Tanjungraya)

Persepsi Dan Tingkat Partisipasi Masyarakat Pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) Di Kabupaten Mesuji (Studi Kasus Kecamatan Tanjungraya)

Agung Wihandoko

Alumni Magister Ilmu Ekonomi (MIE) FEB Unila

Social's Perception And Rate Of Participations In National Program Of Independent Community Empowerment (PNMP Mandiri) In Mesuji Regency (Case Study at Tanjungraya District)

ABSTRACT

This research aims to give assessment and evaluation to perception and social's participation rate in implementation of PNPM Mandiri at Tanjung Raya District of Mesuji Regency. Social's perception of Tanjung Raya District to the PNPM Mandiri is assessed based on which chosen respondents' statement to the aim and basic principle of the PNPM Mandiri. The rate of Social's participation in implementation of participative activities of PNPM Mandiri is based on theory of typology of Aristein's Eight Steps. The result of this research has concluded that Social's participation at Tanjung Raya District to PNPM Mandiri is in good category. The Rate of Social's participations in PNPM Mandiri implementation is in Placation criteria. Good perception and participation rate in placation degree support successful of PNPM Mandiri implementation. PNPM Mandiri as poverty overcome program in Tanjung Raya Sub-District.

Keywords: PNPM-Mandiri, Perception, Participations

Pendahuluan

Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator penting untuk menilai keberhasilan pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan oleh suatu negara. Pada negara-negara sedang berkembang, kebijakan pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi tersebut seringkali dianggap sebagai instrumen penting untuk mengejar ketertinggalan pembangunan ekonomi dari negara-negara maju. Dengan asumsi *trickle down effect*-nya, pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat menetes hingga ke seluruh lapisan masyarakat, termasuk masyarakat miskin (Adiyoso, 2009). Pada masa awal Orde Baru tahun

1969-1973, perencanaan ekonomi Indonesia masih sangat percaya bahwa *trickle down effect* akan terjadi. Oleh karena itu strategi pembangunan yang diterapkan oleh pemerintah pada awal periode orde baru hingga akhir tahun 70-an terpusatkan pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Namun setelah sepuluh tahun sejak Pelita I fakta memperlihatkan bahwa efek yang diinginkan tidak tercapai, malah menimbulkan ketimpangan ekonomi dimana pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak diikuti oleh pertumbuhan kesempatan kerja yang tinggi pula dan tingkat kemiskinan tidak berkurang secara signifikan. Mulai Pelita III tahun 1979/80-1983/84 strategi pembangunan mulai diubah, tidak hanya pertumbuhan ekonomi akan tetapi berorientasi kesejahteraan rakyat (Tambunan, dalam Zulfachri 2006).

Pada awal tahun 1990 pemerintah mulai melaksanakan program untuk mengatasi kemiskinan langsung di tingkat desa. Pada tahun 1993 pemerintah memulai upaya mengentaskan kemiskinan secara masif, dan untuk mendukung dan melengkapi upaya tersebut pemerintah mengembangkan Program Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tetinggal (P3DT), Program Pengembangan Kecamatan (PPK), Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) dan Jaring Pengaman Sosial (JPS) (Bappenas 2003, dalam Adiyoso 2009). Program-program pengentasan kemiskinan tersebut selain langsung ditujukan untuk membantu masyarakat miskin juga diarahkan untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat melalui pemberdayaan, yang oleh para ahli dianggap sebagai akar penyebab kemiskinan.

Untuk mempertajam program yang lebih bersifat pemberdayaan, pada tanggal 30 April 2007 program-program penanggulangan kemiskinan tersebut dirumuskan kembali menjadi suatu program nasional yang disebut Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri (Adiyoso 2009). PNPM Mandiri mendefinisikan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraannya (PNPM Mandiri, 2007).

Setelah diimplementasikan selama lima tahun, program PNPM Mandiri telah menjangkau seluruh kecamatan di Indonesia dan telah menjadi bagian penting dari kehidupan ribuan masyarakat di Indonesia. Dikutip dari www.kemendagri.go.id yang diakses pada 23 januari 2014, pemerintah

mempublikasikan keberhasilan PPK dan PNPM Mandiri Perdesaan dari awal pengaliran dana di tahun 1999 hingga tahun 2010 baik itu dalam bidang infrastruktur (jalan, jembatan, dan sistem pengairan/irigasi, bidang sosial (sekolah dan pos kesehatan desa), bidang ekonomi (pasar desa dan program dana bergulir), serta bidang energi (listrik desa). Tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan cukup tinggi, secara umum masyarakat telah duduk bersama untuk membuat keputusan dan meninjau penggunaan dana, 50 persen diantaranya termasuk masyarakat miskin dan kaum perempuan.

Selain keberhasilan, berbagai bentuk permasalahan dan kegagalan juga banyak ditemui dalam pelaksanaan PNPM Mandiri di Indonesia. Berdasarkan hasil Rekapitulasi Audit BPKP tahun 2007-2012 terdapat 3.570 temuan dengan berbagai bentuk permasalahan antara lain penyimpangan penggunaan dana, konflik lahan, pungli dari aparat, baik aparat pemerintah maupun aparat keamanan, prasarana dan sarana yang sudah dibangun tidak dapat dimanfaatkan, dan hasil pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi

Rumusan Masalah

Kabupaten Mesuji merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Lampung yang melaksanakan program PNPM Mandiri. Hingga tahun 2013 pemerintah telah menggulirkan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri sebesar Rp51.200 milyar untuk Kabupaten Mesuji dan didistribusikan kepada 7 (tujuh) kecamatan. Kecamatan Tanjungraya merupakan wilayah kecamatan yang cukup penting untuk dinilai atau dievaluasi implementasi PNPM Mandiri-nya. Kecamatan Tanjungraya merupakan kecamatan sebagai sentra perekonomian dan pusat pemerintahan di Kabupaten Mesuji. Pemerintah Kabupaten Mesuji menempatkan Kecamatan Tanjungraya sebagai daerah muka dalam pembangunan wilayah Kabupaten Mesuji. Keberhasilan implementasi program-program pembangunan di Kecamatan Tanjungraya baik itu merupakan program pemerintah daerah maupun pemerintah pusat atau bahkan keduanya (*sharing program*) akan dapat menunjang keberhasilan pembangunan wilayah-wilayah penyangganya (*hinterland*). Keberhasilan PNPM Mandiri Kecamatan Tanjungraya ditentukan oleh persepsi masyarakat dan tingkat partisipasi masyarakat itu sendiri terhadap PNPM Mandiri.

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut diatas, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah persepsi masyarakat Kecamatan Tanjungraya Kabupaten Mesuji terhadap PNPM Mandiri?
2. Bagaimanakah tingkat partisipasi masyarakat di Kecamatan Tanjungraya Kabupaten Mesuji dalam pelaksanaan PNPM Mandiri di wilayahnya?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Menilai dan menganalisis persepsi masyarakat Kecamatan Tanjungraya Kabupaten Mesuji terhadap PNPM Mandiri;
2. Mengidentifikasi tingkat partisipasi masyarakat Kecamatan Tanjungraya Kabupaten Mesuji terhadap pelaksanaan PNPM Mandiri di wilayahnya.

Tinjauan Pustaka Persepsi Masyarakat

Pengertian persepsi dari kamus psikologi adalah berasal dari bahasa Inggris, *perception* yang artinya: persepsi, penglihatan, tanggapan; adalah proses seseorang menjadi sadar akan segala sesuatu dalam lingkungannya melalui indera-indera yang dimilikinya; atau pengetahuan lingkungan yang diperoleh melalui interpretasi data indera (Kartono dan Gulo, 1987 dalam Adrianto, 2006). Faktor-faktor yang berpengaruh pada persepsi adalah faktor internal: perasaan, pengalaman, kemampuan berpikir, motivasi dan kerangka acuan. Sedangkan faktor eksternal adalah: stimulus itu sendiri dan keadaan lingkungan dimana persepsi itu berlangsung. Kejelasan stimulus akan banyak berpengaruh pada persepsi. Bila stimulus itu berwujud benda-benda bukan manusia, maka ketepatan persepsi lebih terletak pada individu yang mengadakan persepsi karena benda-benda yang dipersepsi tersebut tidak ada usaha untuk mempengaruhi yang dipersepsi.

Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan sebagai proses mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah

terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan (Sutoro Eko, 2002 dalam Cholisin, 2011). Masyarakat yang mandiri sebagai partisipan berarti terbukanya ruang dan kapasitas mengembangkan potensi-kreasi, mengontrol lingkungan dan sumberdayanya sendiri, menyelesaikan masalah secara mandiri, dan ikut menentukan proses politik di ranah negara. Masyarakat ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan pemerintahan (Sutoro Eko, 2002 dalam Cholisin, 2011).

Tujuan pemberdayaan masyarakat adalah memampukan dan memandirikan masyarakat terutama dari kemiskinan dan keterbelakangan dan ketidakberdayaan (Cholisin, 2011). Terdapat banyak teknik dan metode pemberdayaan secara partisipatif, namun demikian strategi dasarnya adalah sama. Secara garis besar, langkah-langkah dalam pemberdayaan masyarakat secara partisipatif, adalah: (1) Perumusan konsep; (2) Penyusunan model; (3) Proses perencanaan, (4) Pelaksanaan gerakan pemberdayaan; (5) Pemantauan dan penilaian hasil pelaksanaan, (6) Pengembangan pelestarian gerakan pemberdayaan (BEM-FEUI, 2002).

Partisipasi Masyarakat Pengertian Partisipasi

Davis dalam Finna (2010) mendefinisikan partisipasi sebagai keterlibatan mental dan emosional seseorang individu dalam situasi kelompok tertentu yang mendorongnya untuk mendukung atau menunjang tercapainya tujuan-tujuan kelompok serta ikut bertanggungjawab terhadapnya. Menurut Siagian (1985) dalam Finna (2010) bahwa partisipasi itu ada yang bersifat aktif dan pasif. Partisipasi pasif dapat berarti bahwa dalam sikap, perilaku dan tindakannya tidak melakukan hal-hal yang mengakibatkan terhambatnya suatu kegiatan pembangunan.

Derajat Partisipasi Masyarakat

Terdapat kadar yang berbeda dalam setiap praktek partisipasi. Kadar ini jika diperbandingkan satu sama lain akan membentuk suatu garis kontinum mulai dari titik non partisipasi warga sampai kendali warga sepenuhnya. Untuk memperjelas mana proses yang disebut partisipasi dan bukan partisipasi dalam penelitian ini akan mempergunakan konsep delapan tangga partisipasi masyarakat (*Eight Rungs on Ladder of Citizen Participation*) menurut Arnstein (1969). Dalam konsepnya Arnstein menjelaskan partisipasi masyarakat didasarkan kepada kekuatan masyarakat untuk menentukan suatu produk akhir,

tiap tangga dibedakan berdasarkan “*corresponding to the extent of citizen’s power in determining the plan and/or program*”. Secara umum, dalam model ini ada tiga derajat partisipasi masyarakat : (1) Tidak Partisipatif (*NonParticipation*); (2) Derajat Semu (*Degrees of Tokenism*) dan kekuatan masyarakat (*Degrees of Citizen Powers*). Lebih jelasnya dapat dilihat dalam Gambar 1.

Gambar 1. Tangga partisipasi dari Arnstein



Sumber : <http://www.georgejulian.co.uk>, 2013

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri

PNPM Mandiri adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan, dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan (PNPM, 2007).

Tujuan PNPM Mandiri

Tujuan umum PNPM Mandiri adalah meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri. Sedangkan tujuan khususnya adalah:

- a. Meningkatnya partisipasi seluruh masyarakat, termasuk masyarakat miskin, kelompok perempuan, komunitas adat terpencil, dan kelompok masyarakat

lainnya yang rentan dan sering terpinggirkan ke dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan;

- b. Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat yang mengakar, representatif, dan akuntabel;
- c. Meningkatnya kapasitas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama masyarakat miskin melalui kebijakan, program dan penganggaran yang berpihak pada masyarakat miskin (*pro-poor*);
- d. Meningkatnya sinergi masyarakat, pemerintah daerah, swasta, asosiasi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat, dan kelompok peduli lainnya, untuk mengefektifkan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan;
- e. Meningkatnya keberdayaan dan kemandirian masyarakat, serta kapasitas pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat dalam menanggulangi kemiskinan di wilayahnya.

Prinsip-prinsip PNPM Mandiri

Prinsip-prinsip pelaksanaan PNPM Mandiri antara lain berorientasi pada masyarakat miskin, kesetaraan dan keadilan gender, desentralisasi, keterpaduan, efektif dan efisien, partisipatif, aspiratif, transparansi dan akuntabel, keberlanjutan, bertumpu pada pembangunan manusia, otonomi, toleransi budaya, serta prinsip kepedulian lingkungan.

Tahapan Kegiatan PNPM Mandiri

PNPM Mandiri dilaksanakan dengan tahapan kegiatan sebagai berikut:

- a. Perencanaan
 - 1) Musyawarah Desa (Sosialisasi)
 - 2) Pelatihan KPMD (Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa)
 - 3) Musrenbangdes (PKD)
 - 4) Musrenbangdes/Review Musrenbangdes
 - 5) Penulisan usulan
 - 6) Verifikasi Usulan
 - 7) Musrenbang Kecamatan
 - 8) Forum SKPD (Prioritas Usulan)
 - 9) Penyusunan Design dan RAB Desa
 - 10) Musrenbang Kabupaten
 - 11) Musyawarah Kecamatan (Persiapan Pelaksanaan)
- b. Pelaksanaan
 - 1) Musyawarah Desa Persiapan Pelaksanaan.
 - 2) Pelaksanaan Kegiatan
 - 3) Musyawarah Desa Pertanggungjawaban dan Serah Terima

- 4) Sertifikasi
- 5) Dokumentasi Kegiatan
- 6) Penyelesaian Kegiatan
- 7) Musyawarah Kecamatan Pertanggungjawaban
- 8) Pelestarian

Metode Penelitian

Definisi Variabel

a. Persepsi

Persepsi berasal dari bahasa Inggris yang berarti tanggapan yang pada dasarnya lebih dekat pada pengertian kesan (Hayeb, 1993). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) didefinisikan sebagai tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu; proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui pancaindranya. Persepsi masyarakat terhadap PNPM Mandiri dimaksudkan sebagai kesan atau tanggapan masyarakat (sebagai hasil penafsiran dan penggunaan indarannya) terhadap tujuan dan prinsip-prinsip dasar program PNPM Mandiri.

b. Partisipasi

Dalam PNPM Mandiri partisipasi didefinisikan sebagai keterlibatan masyarakat secara aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan pembangunan dan secara gotong royong menjalankan pembangunan yang dilaksanakan melalui program PNPM Mandiri.

Jenis Data dan Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data primer, yaitu persepsi dan penilaian partisipasi yang berasal dari masyarakat yang lingkungannya pernah melaksanakan maupun yang sedang melaksanakan PNPM Mandiri di Kecamatan Tanjungraya Kabupaten Mesuji.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner, wawancara, observasi, pendokumentasian.

Teknik Pengambilan Sampel

Dengan karakteristik tingkat pendidikan masyarakat yang tidak homogen dan berstrata tersebut maka metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode *proportional stratified random sampling*. Menurut M. Nasir (2003 : 306) rumusnya adalah :

$$n = \frac{N \sum [N_i \cdot P_i (1 - P_i)]}{N^2 \cdot D + \sum [N_i \cdot P_i (1 - P_i)]}$$

Dimana : $D = \frac{B^2}{4} = \frac{0,1^2}{4} = 0.0025$

Keterangan :

- N = total populasi
- N_i = total populasi dari startum i
- n = besarnya sampel
- P_i = proposi populasi
- B = bound of error sebesar 0,1

Pada penelitian ini populasi berjumlah 34.956 orang dengan rincian berdasarkan tingkat pendidikan disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Populasi Penelitian Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	2012	
	Jumlah	%
1. Tidak/Belum Pernah Sekolah	2.654	7,59
2. Tidak/Belum Tamat SD	7.760	22,20
3. SD/MI/Sederajat	16.168	46,25
4. SLTP/MTs/Sederajat	5.598	16,02
5. SLTA/MA/SMK/Sederajat	2.240	6,41
6. Diploma (D1/D2/D3)	276	0,79
7. Sarjana (S1/S2/S3)	260	0,74
Jumlah	34.956	100,00

Sumber: Data Sensus Penduduk 2010 - BPS Republik Indonesia.

Catatan: Terjadi perubahan kecil pada tabel ini karena koreksi dan validasi data. Perubahan terhitung mulai tanggal 4 Mei 2012.

Berdasarkan jumlah populasi dan dengan menggunakan formulasi sampling tersebut diatas, maka sampling yang didapat adalah:

$$n = \frac{34.956 \sum [34.956 \cdot 0,5(1 - 0,5)]}{34.956^2 \cdot 0,0025 + \sum [34.956 \cdot 0,5(1 - 0,5)]} = \frac{305.480.484}{3.063.544} = 100$$

Dengan menggunakan metode alokasi proposional maka sampel yang berjumlah 100 dibagi untuk setiap strata (jenjang pendidikan).

Tabel 2. Sampel Penelitian Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Populasi	Proporsi (%)	Sample
1. Tidak/Belum Pernah Sekolah	2.654	7,57	8
2. Tidak/Belum Tamat SD	7.760	22,14	22
3. SD/MI/Sederajat	16.168	46,12	46
4. SLTP/MTs/Sederajat	5.598	15,97	16
5. SLTA/MA/SMK/Sederajat	2.240	6,39	6
6. Diploma (D1/D2/D3)	276	0,79	1
7. Sarjana (S1/S2/S3)	260	0,74	1
Jumlah	34.956	100,00	100

Sumber: Hasil Analisis, 2014.

Teknik Analisis

Uji Validitas dan Realiabelitas Kuisiонер

a. Uji Validitas Instrumen

Uji kevalidan digunakan untuk menunjukkan sejauh mana kuisiонер dapat mengukur tanggapan dari responden. Karena penelitian ini merupakan penelitian tentang persepsi maka validitas yang digunakan adalah validitas konstruk (M. Nazir, 2003 : 148). Untuk mengetahui validitas setiap butir pertanyaan dalam instrumen maka dilakukan pengkorelasian skor butir dengan skor total menggunakan Korelasi Product Moment sebagai berikut(Hussein Umar, 2003:203):

$$r = \frac{n(\sum XY) - (\sum X \sum Y)}{\sqrt{n \sum X^2 - (\sum X)^2} * \sqrt{n \sum Y^2 - (\sum Y)^2}}$$

Dimana:

- r = keeratan hubungan (korelasi)
- X = Skor butir pertanyaan
- Y = Skor total
- n = Jumlah pertanyaan

Dari hasil pre-test untuk menguji validitas instrumen penelitian (kuisiонер), terdapat 2 (dua) butir pertanyaan yang memiliki r hitung lebih kecil dari pada r tabel atau tidak valid, sedangkan sisanya memiliki r hitung yang lebih besar dari pada r tabel atau dengan kata lain valid. Butir-butir pertanyaan yang memiliki r hitung lebih kecil dari pada r tabel atau tidak valid selanjutnya tidak disertakan kembali kedalam kuisiонер penelitian (dihapus).

Tabel 3. Validitas Butir Pertanyaan Instrumen (Kuisisioner) Penelitian

Butir Pertanyaan		r Hitung	r Tabel	Keterangan
A. Tujuan Program	1	0,426	0,361	valid
	2	0,493	0,361	valid
	3	0,539	0,361	valid
	4	0,528	0,361	valid
	5	0,528	0,361	valid
B. Prinsip Program	6	0,442	0,361	valid
	7	0,358	0,361	tidak valid
	8	0,634	0,361	valid
	9	0,280	0,361	tidak valid
	10	0,502	0,361	valid
	11	0,476	0,361	valid
	12	0,502	0,361	valid
	13	0,565	0,361	valid
	14	0,552	0,361	valid
	15	0,542	0,361	valid

Sumber: Hasil Analisis

b. Uji Realiabelitas Instrumen

Uji reliabelitas digunakan untuk menunjukkan sejauh mana alat pengukur yang digunakan dapat dipercaya dengan menggunakan rumus alpha (α) menurut Hussein Umar (2003:207). Jika nilai alpha (α) \geq 0,361 maka dapat disimpulkan instrumen tersebut reliabel. Dalam penelitian ini uji realibelitas dilakukan dengan bantuan *Software SPSS 20 for Windows* sehingga diperoleh nilai alpha (α) sebesar 0,732. Karena nilai alpha (α) lebih besar dari 0,361 maka dapat disimpulkan bahwa instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah reliabel.

Tabel 4. Hasil Uji Reliabelitas Instrumen (Kuisisioner) Penelitian dengan Menggunakan *Software SPSS 20 for Windows*

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,732	,831	14

Sumber: Hasil Analisis

Analisis Persepsi Masyarakat

Metode yang digunakan untuk mengukur persepsi masyarakat adalah Metode Skala Likert. Skala Likert merupakan metode pengukuran yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau kelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiono, 2012). Skala ukur dan skor yang digunakan adalah sebagai berikut:

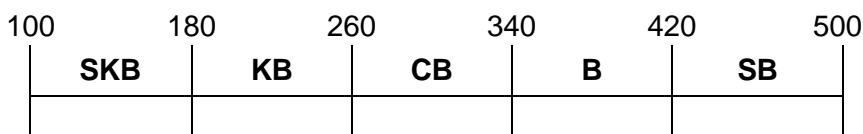
- 1 = sangat setuju (SS, bobot 5)
- 2 = setuju (S, bobot 4)
- 3 = cukup setuju (A, bobot 3)
- 4 = tidak setuju (TS, bobot 2)
- 5 = sangat tidak setuju (STS, bobot 1).

Untuk menghitung jumlah skor ideal (kriterium) dari seluruh item, digunakan rumus berikut:

$$\text{Skor Kriterium} = \text{Nilai skala} \times \text{Jumlah responden}$$

Selanjutnya, skor yang telah diperoleh kemudian dimasukkan kedalam rating scale. Rating scale berfungsi untuk mengetahui hasil kuisisioner dan wawancara secara umum dan keseluruhan yang didapat dari penilaian angket (kuisisioner) dan wawancara.

Gambar 1. *Rating Scale* Persepsi Masyarakat Kecamatan Tanjungraya Kabupaten Mesuji terhadap PNPM Mandiri



Keterangan:

- SKB = sangat kurang baik
- KB = kurang baik
- CB = cukup baik
- B = baik
- SB = sangat baik

Analisis Partisipasi Masyarakat

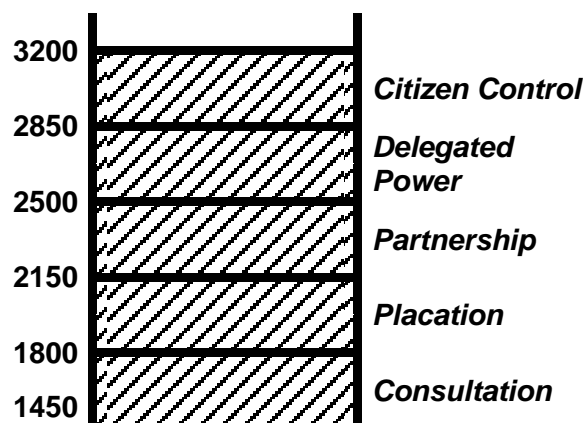
Dalam penelitian ini tingkat partisipasi masyarakat diukur hanya pada kegiatan-kegiatan PNPM Mandiri yang melibatkan partisipasi seluruh masyarakat (bukan perwakilan) sebagai berikut:

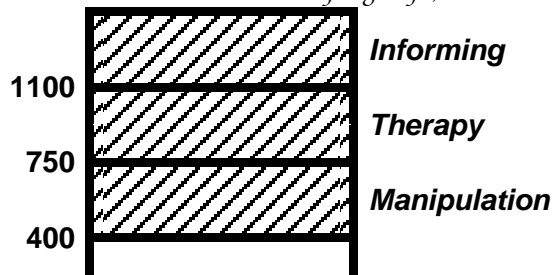
- a. Tahap perencanaan dengan bentuk kegiatannya adalah Musyawarah Desa (Sosialisasi), Musyawarah Perencanaan Pembangunan Dusun (Musrenbangdus);
- b. Tahap pelaksanaan dengan bentuk kegiatannya adalah Musyawarah Desa Persiapan Pelaksanaan, serta Musyawarah Desa Pertanggungjawaban dan Serah Terima.

Tingkat partisipasi masyarakat diukur dengan metode kuantitatif melalui penjumlahan skor dari variabel. Berdasarkan jumlah skor dari semua variabel, dapat diketahui tingkat partisipasi masyarakat masuk dalam kategori tipologi delapan tangga partisipasi Arnstein. Besarnya interval skor untuk menentukan kategori tingkat partisipasi masyarakat secara menyeluruh didasarkan pada skor kategori tingkat partisipasi individu dikalikan dengan jumlah sampel.

Terdapat 4 kriteria pertanyaan yang merupakan representasi dari kegiatan PNPM Mandiri yang melibatkan partisipasi seluruh masyarakat (bukan perwakilan) dengan pilihan jawaban masing-masing pertanyaan ada 8 pilihan dengan skor masing-masing berkisar 1 sampai 8. Sehingga minimum skor yang diperoleh untuk setiap individu (4×1) adalah 4, maksimum skor yang diperoleh untuk setiap individu (4×8) adalah 32. Bila jumlah sampel 100, dapat diketahui skor minimum untuk tingkat partisipasi masyarakat (100×4) adalah 400 dan skor maksimum (100×32) adalah 3200. Dengan diketahuinya skor minimum dan maksimum maka diketahui pula jarak interval, yaitu $(3200-400)/8 = 350$. Bila digunakan tipologi dari Arnstein, sehingga dapat diketahui tingkat partisipasi sesuai Gambar 2.

Gambar 2. Jarak Interval Tipologi Arnstein pada Derajat Partisipasi Masyarakat dalam PNPM Mandiri di Kecamatan Tanjungraya





Sumber: Hasil Analisis, 2014

Hasil Dan Pembahasan

Gambaran Umum Kecamatan Tanjungraya

Penduduk

Berdasarkan data Mesuji dalam Angka Tahun 2012 diketahui bahwa jumlah penduduk Kecamatan Tanjungraya tahun 2012 sebanyak 34.956 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk mencapai 144 jiwa per meter persegi. Jumlah penduduk terbanyak berada di Desa Brabasan mencapai 12,96 persen atau 4.532 jiwa sedangkan yang terendah ada di Desa Kagungan Dalem sebesar 2,15 persen atau 752 jiwa.

Pada tahun 2012 sebagian besar mata pencaharian penduduk di Kecamatan Tanjungraya adalah petani yang mencapai 29,99 persen atau sebanyak 10.484 orang, sedangkan yang terendah berprofesi sebagai TNI/Polisi sebesar 0,51 persen atau sebanyak 178 orang.

Pendidikan

Hingga tahun 2012, Kecamatan Tanjungraya memiliki total Sekolah Dasar sebanyak 21 sekolah dengan jumlah murid sebanyak 4.403 orang dan guru sebanyak 140 orang. Jumlah Sekolah Menengah Pertama sebanyak 9 sekolah dengan 1.479 siswa dan 66 guru. Jumlah Sekolah Menengah Atas sebanyak 4 sekolah dengan 1.342 siswa dan 86 guru.

Kesehatan

Hingga tahun 2012, fasilitas kesehatan yang ada di Kecamatan Tanjungraya adalah Puskesmas 1 unit, praktek dokter 2 unit, praktek bidan 19 unit, dan pos yandu 23 unit, sedangkan rumah sakit umum dan balai pengobatan belum ada.

Karakteristik Responden

Responden penelitian ini adalah masyarakat di 13 desa di Kecamatan Tanjungraya Kabupaten Mesuji yang berjumlah 100 orang dan dipilih secara proporsional berdasarkan tingkat pendidikannya (strata). Karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan disajikan pada Tabel 17.

Tabel 5. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	2012	
	Jumlah	Proporsi
1. Tidak/Belum Pernah Sekolah	8	7,57
2. Tidak/Belum Tamat SD	22	22,14
3. SD/MI/Sederajat	46	46,12
4. SLTP/MTs/Sederajat	16	15,97
5. SLTA/MA/SMK/Sederajat	6	6,39
6. Diploma (D1/D2/D3)	1	0,79
7. Sarjana (S1/S2/S3)	1	0,74
Jumlah	100	100,00

Sumber: Bappeda Kab. Mesuji, 2013

Deskripsi Hasil Penelitian

Persepsi Masyarakat

Berdasarkan hasil survey, persepsi masyarakat Kecamatan Tanjungraya terhadap PNPM Mandiri berada dalam kategori B (baik) dengan skor rata-rata sebesar 397. Berdasarkan masing-masing variabelnya, persepsi masyarakat Kecamatan Tanjungraya terhadap tujuan PNPM Mandiri berada dalam kategori B (baik) dengan skor sebesar 398.

Tabel 6. Rekapitulasi Skor dan Kriteria Persepsi Masyarakat Kecamatan Tanjungraya Terhadap Tujuan PNPM Mandiri

Tujuan PNPM Mandiri	Skor
Tujuan PNPM Mandiri	
1. Meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat	406
2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat	403
3. Meningkatkan kapasitas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat	378
4. Meningkatkan sinergi masyarakat, pemerintah daerah dan kelompok peduli lainnya	409
5. Meningkatkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat	396
Skor Rata-rata	398
Kriteria	Baik

Begitu juga halnya persepsi masyarakat Kecamatan Tanjungraya terhadap dan prinsip-prinsip dasar program PNPM Mandiri yang juga berada dalam kategori B (baik) dengan skor sebesar 396.

Tabel 7. Rekapitulasi Skor dan Kriteria Persepsi Masyarakat Terhadap Prinsip Dasar PNPM Mandiri di Kecamatan Tanjungraya

Prinsip PNPM Mandiri	Skor
Prinsip PNPM Mandiri	
1. Otonomi	405
2. Berorientasi pada Masyarakat Miskin	407
3. Kesetaraan dan Keadilan Gender	390
4. Transparan dan Akuntabel	404
5. Bertumpu pada Pembangunan Manusia	376
6. Partisipatif	399
7. Kepedulian Lingkungan	396
8. Aspiratif	389
Skor Rata-rata	396
Kriteria	Baik

Sumber: Hasil Analisis

Tingkat Partisipasi Masyarakat

Dari hasil survey dengan melibatkan 100 orang responden dapat diketahui bahwa tingkat partisipasi masyarakat Kecamatan Tanjung Raya terhadap pelaksanaan kegiatan-kegiatan partisipatif PNPM Mandiri seperti Musyawarah Desa (Sosialisasi), Musyawarah Perencanaan Pembangunan Dusun, Musyawarah Desa Persiapan Pelaksanaan, serta Musyawarah Desa Pertanggungjawaban dan Serah Terima secara keseluruhan berada pada kriteria Penentraman (*Placation*) dengan skor total sebesar 2012.

Tabel 8. Rekapitulasi Skor Tingkat Partisipasi Masyarakat Kecamatan Tanjungraya Terhadap Pelaksanaan Kegiatan-Kegiatan Partisipatif PNPM Mandiri

Tahapan PNPM Mandiri	Kegiatan	Skor
I. Tahap Perencanaan	1. Musyawarah Desa (Sosialisasi)	502
	2. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Dusun (Musren bangdus)	518
II. Tahap Pelaksanaan	3. Musyawarah Desa Persiapan Pelaksanaan	512
	4. Musyawarah Desa Pertanggungjawaban dan Serah Terima	480
Skor Total		2012
Kriteria		Placation

Sumber: Hasil Analisis

Hal itu berarti bahwa dalam proses pelaksanaan kegiatan musyawarah-musyawarah tersebut masyarakat telah mampu berkomunikasi dengan pemerintah secara baik dan sudah ada negosiasi antara masyarakat/wakil masyarakat dengan pemerintah. Masyarakat (khususnya yang rentan dan termajinalisasi) memberikan masukan secara lebih signifikan dalam penentuan hasil keputusan, namun proses pengambilan keputusan masih dipegang oleh pemerintah.

Pembahasan Hasil Penelitian

Persepsi masyarakat Kecamatan Tanjungraya Kabupaten Mesuji terhadap tujuan-tujuan PNPM Mandiri yang berada pada interval/kategori B (baik) mencerminkan bahwa segala tindakan yang dilakukan masyarakat dalam setiap tahapan program diorientasikan pada upaya-upaya mencapai tujuan dan keberhasilan program. Selain itu, masyarakat Kecamatan Tanjungraya juga dapat menerjemahkan prinsip-prinsip PNPM Mandiri sebagai nilai-nilai dasar yang harus diterapkan secara tepat dan konsisten. Prinsip-prinsip PNPM Mandiri selalu menjadi landasan atau acuan dalam setiap pengambilan keputusan maupun tindakan yang akan diambil dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan PNPM Mandiri di Kecamatan Tanjungraya.

Derajat partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan-kegiatan partisipatif PNPM Mandiri seperti Musyawarah Desa, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Dusun, Musyawarah Desa Persiapan Pelaksanaan, serta Musyawarah Desa Pertanggungjawaban dan Serah Terima secara keseluruhan berada pada kriteria Penentraman (*Placation*). Hal itu berarti bahwa dalam proses pelaksanaan kegiatan musyawarah-musyawarah tersebut masyarakat telah mampu berkomunikasi dengan pemerintah secara baik dan sudah ada negosiasi antara masyarakat/wakil masyarakat dengan pemerintah. Masyarakat (khususnya yang rentan dan termajinalisasi) memberikan masukan secara lebih signifikan dalam penentuan hasil keputusan, namun proses pengambilan keputusan masih dipegang oleh pemerintah.

Persepsi yang baik masyarakat Kecamatan Tanjung Raya terhadap prinsip-prinsip dasar PNPM Mandiri dan tujuan-tujuan PNPM Mandiri serta posisi derajat partisipasi masyarakat Kecamatan Tanjung Raya dalam pelaksanaan PNPM Mandiri di Kecamatan Tanjungraya tentunya sangat mendukung keberhasilan program PNPM Mandiri khususnya di Kecamatan Tanjungraya dan Kabupaten

Mesuji. Jika dikaitkan dengan latar belakang PNPM Mandiri sebagai program penanggulangan kemiskinan, penelitian ini tentunya tidak dapat menjawab dampak pelaksanaan PNPM Mandiri terhadap tingkat kemiskinan di Kecamatan Tanjungraya secara langsung. Akan tetapi, keberhasilan pelaksanaan PNPM Mandiri merupakan cerminan dari keberhasilan dari program pengentasan kemiskinan yang digulirkan oleh pemerintah. Peran PNPM Mandiri terhadap penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Tanjungraya dapat ditinjau dari kecenderungan penggunaan dana PNPM Mandiri di Kecamatan Tanjungraya dan tingkat kemiskinan di Kecamatan Tanjungraya.

Dalam PNPM Mandiri, kemiskinan dipandang sebagai keterbatasan atau rendahnya akses masyarakat miskin terhadap pelayanan prasarana dasar, antara lain jalan dan jembatan, air minum, irigasi dan sebagainya. Rendahnya akses tersebut menyebabkan masyarakat perdesaan sulit untuk meningkatkan aktivitas perekonomian. Pembangunan infrastruktur akan memberikan dampak multiplier yang besar dengan menurunkan biaya transaksi dan pemasaran sehingga memungkinkan kesempatan berusaha yang lebih luas dan penurunan biaya hidup (Pedoman PNPM Mandiri, 2007).

Pada tahun 2010 garis kemiskinan Kabupaten Mesuji sebesar Rp228.027/kapita/bulan, sedangkan jumlah penduduk miskin di Kecamatan Tanjungraya adalah sebesar 2.937 jiwa (8,65%). Pada tahun yang sama (2010) pemerintah telah mengalokasikan dana PNPM Mandiri untuk Kecamatan Tanjungraya sebesar Rp2.363 juta yang bersumber dari APBN (95%) dan APBD (5%). Dengan dana sebesar Rp2.363 juta tersebut, masyarakat Kecamatan Tanjungraya telah berhasil membangun infrastruktur jalan telford dengan total volume sebesar 11.601 meter pada 4 (empat) titik lokasi. Pada tahun berikutnya (2011) garis kemiskinan Kabupaten Mesuji mengalami peningkatan sebesar 12,35% atau menjadi sebesar Rp256.185/kapita/bulan. Pada tahun 2011 tersebut jumlah penduduk miskin di Kecamatan Tanjungraya berjumlah 2.879 jiwa (8,39%) atau mengalami penurunan sebesar 2,01% dari tahun sebelumnya (2010). Dari kondisi tersebut dapat ditekan bahwa walaupun garis kemiskinan pada tahun 2011 meningkat, akan tetapi jumlah dan persentase penduduk miskin di Kecamatan Tanjungraya pada tahun yang sama mengalami penurunan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pada tahun 2011 tingkat kesejahteraan penduduk miskin di Kecamatan Tanjungraya mengalami

peningkatan. Telah terjadi peningkatan pendapatan penduduk miskin di Kecamatan Tanjungraya pada tahun 2011. Kondisi tersebut terus terjadi pada tahun-tahun berikutnya (hingga 2013).

Tabel 13. Garis Kemiskinan dan Tingkat Kemiskinan di Kecamatan Tanjungraya Kabupaten Mesuji Tahun 2010-2013

Tahun	Garis Kemiskinan Kabupaten Mesuji (Rp/Kap/Bln)	Jumlah Penduduk Miskin	Persentase Penduduk Miskin
2010	228.027	2.937	8,65%
2011	256.185	2.879	8,39%
2012	274.492	2.821	8,07%
2013	296.102	2.716	7,69%

Sumber: Bappeda Kabupaten Mesuji, 2014

Dengan mengikuti tren yang telah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2013 garis kemiskinan Kabupaten Mesuji kembali meningkat, yaitu sebesar 7,87% atau menjadi sebesar Rp296.102/kapita/bulan. Jumlah penduduk miskin di Kecamatan Tanjungraya pada tahun 2013 tersebut adalah sebesar 2.716 jiwa (7,69%) atau mengalami penurunan sebesar 3,87% dari tahun sebelumnya (2012). Dengan peningkatan garis kemiskinan yang disertai dengan penurunan jumlah dan persentase penduduk miskin di Kecamatan Tanjungraya tersebut kembali mencerminkan keberhasilan pemerintah “pusat hingga desa” dan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Tanjung Raya. Pada tahun 2013 alokasi anggaran PNPM Mandiri untuk Kecamatan Tanjungraya kembali peningkatan, yaitu sebesar 11,65% dari tahun sebelumnya atau menjadi sebesar Rp3.461 juta dengan porsi 27% bersumber dari APBN dan 73% bersumber APBD. Dengan dana sebesar Rp3.461 juta tersebut, masyarakat Kecamatan Tanjungraya telah berhasil membangun infrastruktur jalan telford, drainase, pengerasan jalan sub base, dan rabat beton. Melalui perbaikan infrastruktur yang terealisasi dari dana PNPM Mandiri yang dikelola oleh pemerintah dan masyarakat desa di Kecamatan Tanjungraya tersebut diharapkan dapat kembali memicu peningkatan aktivitas perekonomian dan aktivitas masyarakat lainnya yang bermuara pada peningkatan pendapatan masyarakat khususnya masyarakat miskin di Kecamatan Tanjungraya.

Tabel 14. Alokasi Anggaran PNPM Mandiri di Kecamatan Tanjungraya Kabupaten Mesuji Tahun 2010-2013

Tahun	Anggaran PNPM Mandiri						Kegiatan	Volume/ Satuan
	APBN		APBD		Total			
	Juta Rupiah	%	Juta Rupiah	%	Juta Rupiah	%		
2010	2.250	95,24	113	4,76	2.363	100	1. Jalan telford 2. Jalan telford 3. Jalan telford 4. Jalan telford	3.150 M 3.501 M 1.950 M 3.000 M
2011	2.750	95,24	138	4,76	2.888	100	1. Pembuatan Jalan Telford 2. Pembuatan Jalan Telford 3. Pembuatan Jalan Telford 4. Pembangunan Drainase	3.570 M 3.153 M 3.570 M 1.260 M
2012	1.220	39,36	1.880	60,64	3.100	100	1. Pengerasan jalan telford 2. Rabat beton 3. Pengerasan jalan subbase 4. Gorong2 plat beton	4.940 M 1.620 M 2.975 M 6 Unit
2013	929	26,83	2.533	73,17	3.461	100	1. Perkerasan Telford 2. Drainase 3. Perkerasan Telford 4. Perkerasan Sub Base 5. Rabat Beton	2.268 M 1.001 M 2.625 M 2.385 925

Sumber: Bappeda Kabupaten Mesuji, 2014

Kesimpulan Dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa:

1. Persepsi masyarakat terhadap PNPM Mandiri di Kecamatan Tanjungraya Kabupaten Mesuji dikategorikan B (baik);
2. Responden pada berbagai tingkat pendidikan (mulai dari tidak/belum pernah sekolah hingga sarjana) cenderung memberikan jawaban/ Pernyataan setuju (S) dan sangat setuju (SS) terhadap keseluruhan butir soal baik tentang tujuan-tujuan maupun prinsip-prinsip PNPM Mandiri. Hal itu mencerminkan keberhasilan yang baik dari pemerintah (pusat hingga desa) beserta tenaga Fasilitator Masyarakat dalam memberikan pendampingan dan fasilitasi pelaksanaan PNPM Mandiri di Kecamatan Tanjungraya.

3. Tingkat partisipasi masyarakat di Kecamatan Tanjungraya Kabupaten Mesuji dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan partisipatif PNPM berada pada kriteria Penentruman (*Placation*). Derajat partisipasi tersebut mencerminkan bahwa pendekatan partisipatif sebagai ruh program pemberdayaan masyarakat dalam pengentasan kemiskinan (PNPM Mandiri) dapat dikatakan telah terimplementasi dengan cukup baik.
4. Persepsi masyarakat yang baik terhadap PNPM Mandiri dan tingkat partisipasi masyarakat yang berada pada derajat yang baik akan mendukung keberhasilan pelaksanaan PNPM Mandiri sebagai salah satu program pengentasan kemiskinan di Kecamatan Tanjungraya. Keberhasilan program pengentasan kemiskinan di Kecamatan Tanjungraya itu sendiri tentunya berpengaruh terhadap pengurangan angka kemiskinan di Kecamatan Tanjungraya.

Saran

Memperhatikan hasil kesimpulan di atas maka beberapa saran yang dapat diberikan dalam rangka peningkatan kualitas program PNPM Mandiri dan pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Tanjungraya Kabupaten Mesuji adalah:

1. Sosialisasi program yang ditekankan pada tujuan dan prinsip-prinsip PNPM Mandiri harus terus dilakukan secara intensif dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat.
2. Partisipasi masyarakat sesuai dengan kapasitas dan kewenangannya sebagai input utama dalam pelaksanaan program pembangunan harus ditingkatkan hingga pada level *Partnership* (Kemitraan), Pendelegasian (*Delegated Power*) dan bahkan jika dapat hingga pada level Kendali Warga (*Citizen Control*) dengan memberikan sebagian kewenangan pemerintah secara nyata dalam proses pembangunan kepada masyarakat.
3. Prilaku masyarakat sebagai agen utama pembangunan yang baik seperti halnya pada pelaksanaan PNPM Mandiri harus terimplementasikan pada berbagai program-program dan kegiatan pembangunan yang lainnya, tidak hanya pada pelaksanaan PNPM Mandiri saja.
4. Keberlanjutan program pembangunan yang mampu meningkatkan kapasitas kemandirian dan keberdayaan masyarakat harus terus dilaksanakan baik di

Agung Wihandoko

Persepsi Dan Tingkat Partisipasi Masyarakat Pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) Di Kabupaten Mesuji (Studi Kasus Kecamatan Tanjungraya)

Kecamatan Tanjungraya maupun di wilayah lainnya di Indonesia hingga pada masa mendatang.

Daftar Pustaka

- Adiyoso, Wignyo. 2009. *Menggugat Perencanaan Partisipatif dalam Pemberdayaan Masyarakat*. ITS Press, Surabaya.
- Adrianto, Bowo. 2006. *Persepsi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Prasarana Dasar Permukiman yang Bertumpu Pada Swadaya Masyarakat di Kota Magelang*. Universitas Diponegoro, Semarang.
- Apriyanti. 2011. *Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan Di Kota Solok*. Universitas Andalas, Padang.
- Arnstein, Sherry R. 1969. A Ladder of Citizen Participation. JAIP, Vol. 35, No. 4, July 1969, pp. 216-224.
- BEM-FEUI. 2002. *Teknik Pemberdayaan Masyarakat*. Makalah dalam Pelatihan Program Pengembangan Desa Binaan Bogor, 26–29 September 2002.
- Cholisin. 2011. *Pemberdayaan Masyarakat*. Makalah. Disampaikan Pada Gladi Manajemen Pemerintahan Desa Bagi Kepala Bagian/Kepala Urusan Hasil Pengisian Tahun 2011 Di Lingkungan Kabupaten Sleman, 19-20 Desember 2011.
- Emby. 2011. *Relationship Between citizen's Perception and Level of Participation in Local Government*. International Conference on Social Science and Humanity IPEDR vol.5 (2011), IACSIT Press, Singapore.
- Nasir, Moh. 1999. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- PNPM. 2007. Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri). <http://pnpm-mandiri.org>.
- Siagian, JE. 2007. *Analisis Dampak Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pengembangan Kecamatan Terhadap Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Deli Serdang*. USU, Medan.
- Singarimbun, Masri. 1995. *Metode Penelitian Survei*. LP3S, Jakarta
- SMERU, LP. 2012. *Studi Kualitatif Dampak PNPM Perdesaan*, Bappenas. Jakarta.
- Sofianto, dkk. 2009. *Kajian Kapasitas dan Keberlanjutan Kelembagaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) Perdesaan dan Pengelolaan Keuangan di Unit Pengelola Kecamatan (UPK) (Studi Kasus*

Agung Wihandoko

- Persepsi Dan Tingkat Partisipasi Masyarakat Pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) Di Kabupaten Mesuji (Studi Kasus Kecamatan Tanjungraya) di Kabupaten Temanggung dan Demak*). Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah – Vol.7 No.2, Desember 2009.
- Sugiono, 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. ALFABETA. Bandung.
- Sumaryadi, I Nyoman. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Penerbit Citra Utama, Jakarta.
- Sumodiningrat, Gunawan. 1999. *Pemberdayaan Masyarakat dan JPS*. PT Gramedia, Jakarta.
- Supriyono. 2009. *Pengaruh Implementasi Program Pengembangan Kecamatan Terhadap Perencanaan Pembangunan Partisipatif di Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo*. Universitas Jember, Jember.
- Sutami. 2009. *Partisipasi Masyarakat pada Pembangunan Prasarana Lingkungan Melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) di Kelurahan Marunda Jakarta Utara*. Universitas Diponegoro, Semarang.
- Sutoro, Eko. 2002. *Pemberdayaan Masyarakat Desa*, Materi Diklat Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang diselenggarakan Badan Diklat Provinsi Kaltim, Samarinda, Desember 2002.
- Swedianti, Karina. 2011. *Partisipasi Masyarakat Dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (Kasus Implementasi Program Ekonomi Bergulir PNPM-MP di Desa Cimanggu I, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor)*. IPB, Bogor.
- Syukri, dkk. 2010. *Studi Kualitatif Dampak PNPM Perdesaan 2010*. Lembaga Penelitian SMERU. Jakarta.
- Tambunan, Tulus T.H. 2001. *Perekonomian Indonesia Teori dan Temuan Empiris*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Todaro, Michael P. 1990. *Ekonomi Pembangunan di Dunia Ketiga*. Erlangga, Jakarta.
- Walgito, Bimo. 2000. *Psikologi Sosial (suatu pengantar)*, Yogyakarta, Andi
- Wibisana Gunawan. 1989. *Partisipasi Masyarakat dalam Proses Peremajaan Pasar*, Institut Teknologi Bandung, Bandung.
- Wrihatnolo, R.R., dan Dwidjowijoto, R.N. (2007). *Manajemen Pemberdayaan. Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat*. Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Yulianti, Yoni. 2012. *Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan di Kota Solok*. Universitas Andalas, Padang.
- Zulfachri, Budi. 2006. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Ketidakmerataan terhadap Kemiskinan di Indonesia*. UI, Depok.

Agung Wihandoko

*Persepsi Dan Tingkat Partisipasi Masyarakat Pada Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) Di Kabupaten Mesuji
(Studi Kasus Kecamatan Tanjungraya)*